

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Perumusan Masalah	2
3. Tujuan Penelitian	2
4. Urgensi Penelitian	2
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN ROADMAP	6
1. Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan	6
2. Perpolitikan Lokal	8
3. Road Map Penelitian	13
 BAB III. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Teknik Analisis Data	16
 BAB IV. KONTEKS SOSIAL, KULTURAL	
DAN PERPOLITIKAN RIAU	19
1. Perkembangan Sosio-Politik Riau	20
1.1. Geografi dan Demografi..	20
1.2. Politik dan Pemerintahan	23
2. Ekonomi Politik Perkebunan Kelapa Sawit Riau	29
2.1. Sejarah Perkebunan di Riau	29
2.2. Sejarah Perkebunan K2-I	37
2.3. Tujuan Perkebunan K2-1	46
2.4. Peluang dan Tantangan	48

BAB V. INTERAKSI AKTOR DALAM ISU KEBIJAKAN	
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT K2-I, 2005-2010.....	52
1. Perebutan Kendali atas Proses Perizinan	53
1.1. Kabupaten Kuantang Singingi	60
1.2. Kabupaten Siak	64
2. Konflik Penguasaan Lahan Perkebunan.....	70
2.1.Kabupaten Rokan Hulu.....	70
2.2.Kabupaten Indragiri Hulu.....	72
BAB.VI. ARAH INTERAKSI AKTOR: KASUS KEBIJAKAN	
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT K2-I.....	75
1.Arah Interaksi Aktor.....	76
2.Preferensi Aktor	86
3.Cara Para Aktor Mencapai Kepentingan.....	95
BAB.VII.POLA INTERAKSI DAN MODEL FORMULASI :	
KASUS KEBIJAKAN K2I	115
1.Kebijakan K2I Sebagai Inisiatif Lokal.....	115
2. Pola Interaksi Aktor	120
3.Model Formulasi Kebijakan Dalam Situasi Berubah.....	145
VIII. PENUTUP.	154
Kesimpulan.....	154
Rekomendasi	157
DAFTAR PUSTAKA	159
Lampiran	161

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1. Jumlah dan Luas Kabupaten/Kota Sesudah Pemekaran Di Riau	(21)
Tabel IV.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Riau tahun 2005-2010	(23)
Tabel IV.3. Jumlah dan Luas Kabupaten/Kota Sesudah Pemisahaan Provinsi Riau Kepulauan	(27)
Tabel IV.4. Rincian Perolehan Kursi Parpol Hasil Pemilu 1999 Di DPRD Provinsi Riau	(27)
Tabel IV.5. Perkembangan Jumlah LSM di Provinsi Riau Tahun 1998-2003	(28)
Tabel IV.6. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau tahun 2009	(38)
Tabel IV.7. Luas Areal berbagai komoditas perkebunan dan penyebarannya pada Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 200	(43)
Tabel IV.8 Kontribusi Pendapatan Dari Perkebunan Kelapa Sawit	(45)
Tabel IV.9 Luas Lahan Kelapa Sawit Tahun 1998-1999 di Riau	(49)
Tabel VI.1. Identifikasi Aktor, Kepentingan, Basis Institusional, Sumberdaya Politik Terkait Isu Kebijakan Kelapa Sawit Periode 2005-2010	(84)
Tabel VI.2. Gambaran Besaran PBB di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2008/2009	(87)
Tabel VI.3. Jenis Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit	(89)
Tabel VI.4. Matrik aktor, kepentingan, basis dukungan, dan arena Kebijakan	(96)
Tabel VII.1. Interaksi Aktor atas Isu RTRWP Riau 2005-2010	(57)
Tabel VII.2. Interaksi Aktor Dalam RTRW Kabupaten Kuantan Singingi 2010	(62)
Tabel VII.3. Perbandingan Perubahan Pengaturan Pelaksanaan Perizinan Usaha Perkebunan Kep. Menhutbun No. 107/Kpts/II/1993 dan KepMentan No. 357/Kpts/HK.350/5/2002	(68)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar V.2. Skema Pola Interaksi Lokal Kasus Formulasi Kebijakan Perkebunan Kelapa sawit K2I
(SK Gubernur Riau No. 330/011/2001 (133)
- Gambar V.5. Pola Interaksi Aktor dalam Situasi Konflik Memperebutkan Kendali Sumberdaya
Perkebunan Kelapa Sawit di Riau (152)
- Gambar V.6. Model Sinergi Kelompok (153)
- Gambar VII.1. Perbandingan Penguasaan Lahan PBS dan Perkebunan Rakyat Kelapa sawit di Riau
1999-2008 (71)

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ADM	Administrasi
AIP	Aneka Industri Nusantra
AMAR	Anak Melayu Riau
AMDAL	Analisa Dampak Lingkungan
AMPI	Angkatan Pembaharuan Indonesia
APKP	Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan
APBN	Anggaran Pembangunan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pembangunan Belanja Daerah
Arpenlia	Anak Remaja Pencinta Alam
Bappeda	Badan Perencanaan Daerah
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BOT	Buuilt....
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPN	Baadn Pertanahan N asional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CPO	Crude Palm Oil
CPI	Caltex Pacific Indonesia
Dati	Daerah Tingkat
Dephan	Departemen Pertahanan
Disnaker	Dinas Tenaga Kerja
Disbun	Dinas Perkebunan
Dishut	Dinas Kehutanan
Distan	DinasPertanian
Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dirjen	Direktur Jenderal
Dirjenbun	Direktur Jenderal Perkebunan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
Dati	Daerah Tingkat
Dephan	Departemen Pertahanan
Disnaker	Dinas Tenaga Kerja
Disbun	Dinas Perkebunan
Dishut	Dinas Kehutanan
Distan	DinasPertanian
Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dirjen	Direktur Jenderal
Dirjenbun	Direktur Jenderal Perkebunan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
Ekbang	Ekonomi dan pembangunan
FKMR	Forum Komunikasi Masyarakat Riau
GAMRI	Gerakan Masyarakat Riau

GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
Gapensi	Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia
Golkar	Golongan Karya
Gubri	Gubernur Riau
GEMA	Gerakan Masyarakat
GTR	Gerakan Tani Riau
GAMRI	Gerakan Masyarakat Riau
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
Gapensi	Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia
Golkar	Golongan Karya
Gubri	Gubernur Riau
GEMA	Gerakan Masyarakat
GTR	Gerakan Tani Riau
Gubernur	Kepala Wilayah yang menjalankan tugas-tugas pusat di daerah provinsi melalui azas dekonsentrasi
Ha	Hektar
HPH	Hak Penguasaan Hutan
HGU	Hak Guna Usaha
HMI	Himpunan Mahasiswa Indonesia
HPK	Hak Produksi Konversi
HTI	Hutan Tanaman Industri
Ha	Hektar
HPH	Hak Penguasaan Hutan
HGU	Hak Guna Usaha
HMI	Himpunan Mahasiswa Indonesia
HPK	Hak Produksi Konversi
HTI	Hutan Tanaman Industri
Inhu	Indragiri Hulu
Inhil	Indragiri Hilir
IUP	Izin Usaha Perkebunan
IPK	Izin Pemanfaatan Kayu
Jikalahari	Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau
KanDepHut	Kanwil Departemen Kehutanan
Kanwilhut	Kantor Wilayah Kehutanan
KAR	Kumpulan Anak Riau
Kanwil	Kantor Wilayah
KANPI	Komite Pembaharuan Indonesia
Kepri	Kepulauan Riau
Kesra	Kesejahteraan Rakyat
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPO	Karnel Palm Oil
KONI	Komite Nasional Indonesia
KUD	Koperasi Unit Desa
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
Kepmendagri	Keputusan Menteri Dalam Negeri
Kpts	Keputusan

KK	Kepala Keluarga
KKPA	Kredit Koperasi Primer Anggota
KRA	Kanjeng Raden Aryo
KRT	Kanjeng Raden Tumenggung
K2I	Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur
LAMR	Lembaga Adat Melayu Riau
LAM	Lembaga Adat Masyarakat
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPAD	Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Demokrasi
Mantan	Orang yang tidak lagi memegang jabatan tertentu
Mentan	Menteri Pertanian
Menhut	Menteri Kehutanan
Mantan	Orang yang tidak lagi memegang jabatan tertentu
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP	Nomor Induk Wajib Pajak
ORBA	Orde Baru
OTDA	Otonomi Daerah
PAN	Partai Amanat Nasional
Pansus	Panitia Khusus
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBS	Perusahaan Besar Swasta
PBN	Perusahaan Besar Negara
PARI	Persatuan Anak Riau
PBB	Pajak Bumi Bangunan
PBS	Perusahaan Besar Swasta
PBSK	Perkebunan Besar Skala Kecil
PBSM	Perkebunan Besar Skala Menengah
PBSB	Perkebunan Skala Besar
PBN	Perusahaan Besar Negara
Perda	Peraturan Daerah
PERKAPPEN	Persatuan Karyawan Perkebunan Negara
PTP	Perseroan Terbatas Perkebunan
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PMJS	Persatuan Masyarakat Jawa Sekitarnya
PMMAR	Persatuan Masyarakat Minang Asli Riau
Pemilu	Pemilihan Umum
PILKADA-L	Pemilihan Kepala Daerah Langsung
PIR-Trans	Perusahaan Inti Rakyat-Transmigrasi
PIR-Sus	Perusahaan Inti Rakyat Khusus
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PPLH-UNRI	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PKs	Pabrik Kelapa Sawit

PKU	Pekanbaru
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
PT-API	Perusahaan Terbatas Adei Plantation Industry
PTPN	Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara
PUOD	Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
PR	Perkebunan Rakyat
PU	Pekerjaan Umum
Rekom	Rekomendasi
RENSTRA	Rencana Strategis
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTRWN	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RTRWK	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
Rohul	Rokan Hulu
Rohil	Rokan Hilir
SDA	Sumber Daya Alam
Setda	Sekretariat Daerah
SKT	Surat Keterangan Tanah
Tapem	Tata Pemerintahan
TBM	Tanaman Belum Menghasilkan
TBS	Tandan Buah Segar
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TP3D	Tim pembina Proyek-Proyek Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau
Toma	Tokoh Masyarakat
TPSLP	Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan
UUPK	Undang-undang Pokok Kehutanan
UPP	Unit Pelaksana Proyek
Wapangkowilhan	Wakilpanglima Komando
Walhi	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
YPTN	Yayasan Pengembangan Tanah Nusantara